

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan menjadi salah satu proses dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menuju pada kesejahteraan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinia ke-4 dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya,” akan tetapi, masalah kemiskinan sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia. Karena itulah, pemberantasan kemiskinan menjadi agenda utama dari 8 agenda *Millennium Development Goal* (MDG’s) 1990-2015. Upaya Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan menjadi sangat penting karena Bank Dunia menyimpulkan bahwa kemiskinan di Negara kita bukan sekadar 10-20% penduduk yang hidup dalam kemiskinan absolute, tetapi pada kenyataan lainnya membuktikan bahwa kurang lebih tiga per lima atau 60% penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan maka dari itu, mengacu pada paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*” (Chambers, 1995), maka upaya pemberdayaan masyarakat semakin menjadi kebutuhan dalam setiap upaya pembangunan. (Mardikanto & Soebiato 2012:25).

“Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk

mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)”. Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Pasal 5 ayat (2) pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Theresia, dkk 2015:93).

Keadaan lingkungan biofisik dan posisi yang strategis ini memungkinkan struktur perekonomian Kabupaten Sumenep didominasi oleh sektor kelautan, pertanian, perdagangan. Ditengah potensi tersebut Kabupaten Sumenep diharapkan bisa dan dapat untuk memproyeksikan program dalam rangka mensejahterakan masyarakat, tetapi dengan sistem birokrasi yang sulit dan penguasaan monopolistis perusahaan-perusahaan besar yang memiliki akses dan modal yang besar sehingga persaingan usaha tidak kompetitif dan usaha kecil terpaksa tidak berkembang dan mati dengan sendirinya, perlu kita ketahui bahwa Sesuai dengan kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, penciptaan kesempatan kerja tidak mungkin hanya mengandalkan dari pengembangan usaha besar saja. (Sumber: <https://www.kompasiana.com/>)

Penciptaan kesempatan kerja dapat juga dilakukan melalui Wirausaha seperti pengembangan usaha mandiri dan usaha keluarga, serta usaha-usaha kecil dan menengah. Untuk itu sebagian besar angkatan kerja perlu dipersiapkan dengan kemampuan kewirausahaan supaya dapat bekerja mandiri dan atau membangun usaha. Pembangunan dan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah ini akan mampu mendorong tersedianya lapangan kerja yang berdampak kepada menurunnya pengangguran.

Data pertumbuhan ekonomi disumenep terus bergerak meskipun lamban, pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Sumenep sebesar 5,23%. Angka tersebut mengalami kenaikan di tahun 2017 menjadi 5,43%, sementara pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi ditargetkan mampu mencapai 5,70% dari tahun sebelumnya, sementara ditahun 2019 ditargetkan mencapai 5,89%. (Sumber: <https://www.koranmadura.com/2018/pertumbuhan-ekonomi-sumenep>). Meskipun demikian pertumbuhan Ekonomi diSumenep terbilang cukup rendah. Sehingga perlu adanya Upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian di Sumenep.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka Sebagai amanat “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP)”, Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep

menyusun Renstra sebagai upaya penjabaran RPMJD dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugas pemerintahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sumenep serta mempunyai peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan. (Sumber: <http://www.disperindag-sumenep.com>)

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu OPD (Organisasi Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Misi Ketiga Pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2020 yaitu “Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi“. (Sumber: <http://www.disperindag-sumenep.com>) Sebagai tindak lanjut dari keselarasan berjalannya kegiatan rutin dan pembangunan yang lebih bertanggung jawab, maka landasan gerak pelaksanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 34 Tahun 2018, maka Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian dan perdagangan serta pemberdayaan industri dan perdagangan, salah satunya melalui program kegiatan IKM (Industri Kecil Menengah).

Pemberdayaan IKM maka diharapkan terjadi pemerataan dalam distribusi pendapatan dan juga pemerataan pembangunan, sehingga akan mengurangi

diskriminasi spasial antara kota dan desa. Kesenjangan pembangunan antara kota dan desa menyebabkan terjadinya Urbanisasi besar-besaran. Akibatnya, masyarakat desa mencari pekerjaan di kota walaupun ada sumber daya alam yang baik di desa. Dengan nilai tambah sektor pertanian dan kurangnya kebijakan yang bisa membuat sektor pertanian berkembang, mengakibatkan generasi muda tidak mau lagi bekerja di sektor ini.

Sebagaimana yang disampaikan oleh mas Arif Wahyudi selaku Tim HRD Canteng Koning yang bergerak di bidang IKM non Agro, bahwasanya:

“Kontribusinya IKM terhadap prekonomian yahh berupa penyerapan tenaga kerja, semakin tingginya permintaan konsumen dengan adanya promosi maka kami semakin membutuhkan tenaga kerja yang kreatif dan produktif, apalagi kami mempekerjakan orang-orang yang memang asli Sumenep itu untuk mengurangi kesenjangan social yang dimana kebanyakan anakmuda-anakmuda terpaksa mencari pekerjaan sampai keJakarta, karna sempitnya lapangan kerja di Sumenep” (wawancara Senin 4 Maret 2019, di Galeri Canteng Koning, Pangarangan Sumenep).

Sedangkan Permasalahan mendasar IKM yang berbasis kemandirian keberadaannya sangat berfluktuatif (tidak stabil), hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan, maka “tumbuh” dan “mati” nya ini seringkali sangat sukar terdeteksi. Pembinaan yang serius pada sektor Usaha kecil dan menengah yang berbasis kemandirian sangat penting, meliputi pelatihan terhadap sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna dan kemitraan dengan lembaga lain diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk perkembangan Usaha kecil menengah berbasis kemandirian ini.

Maka hal inilah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan kemandirian perekonomian Pedesaan Dan Perkotaan Dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal Yang Unggul Berdaya Saing Tinggi, dengan Memberdayakan kelompok usaha melalui program IKM (Industri Kecil Menengah) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan memberdayakan kelompok usaha IKM (Industri Kecil Menengah) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumenep).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Bagi Penulis**

Penelitian ini disusun bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berfikir dan menulis secara ilmiah serta menambah pengetahuan penulis terhadap perkembangan program yang di jalankan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten sumenep.

##### **1.4.2 Bagi Universitas Wiraraja Sumenep**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dari suatu karya ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengkajian lebih lanjut terkait penelitian ini khususnya bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

##### **1.4.3 Bagi Pemerintah/Instansi Terkait**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi mahasiswa terkait Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyusun laporan penelitian yang terstruktur dan sistematis sesuai kaidah penulisan karya tulis ilmiah, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik dan mudah dipahami

oleh pembaca. Selain itu, penulisan yang sistematis merupakan salah satu Syarat mutlak dalam penulisan secara ilmiah, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

1.5.1. Bab I terdiri dari: berisi pendahuluan yang dipaparkan tentang latar belakang yang peneliti ambil, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang Pemberdayaan Kelompok Usaha Industri Kecil Menengah (IKM) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi di Disperindag Kab. Sumenep). Pada bab ini juga terdapat rumusan masalah penelitian yang dimaksudkan dapat menganalisa permasalahan yang ada, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika.

1.5.2. Bab II terdiri dari: kerangka dasar teori, mengulas penelitian terdahulu terkait dengan dengan pemberdayaan yang menjadi acuan/pedoman penulisan. Bab ini juga mengulas teori – teori yang di gunakan dalam penelitian.

1.5.3. Bab III Metodologi penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan peneliti selama akan melakukan penelitian yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan keabsahan data. Peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif.

1.5.4. Bab IV menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang peneliti ambil, yakni gambaran secara rinci Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep berkaitan dengan selayang pandang, visi



dan misi kantor yang mengacu pada Undang-undang, motto kantor, informasi tugas perbidang, serta struktur organisasi.

1.5.5. Bab V memaparkan keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh langsung dari obyek penelitian, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep dengan mengacu pada fokus penelitian yang diambil, yakni teori Mardikanto & Soebianto (2012:113-117) untuk selanjutnya dilakukan analisa dan dibahas dalam sub pembahasan yang dipadukan dengan berbagai teori-teori yang peneliti sajikan pada tinjauan pustaka.

1.5.6. Terakhir, bab VI peneliti memaparkan mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan penelitian yang diangkat, serta peneliti memberikan saran bagi perbaikan pelaksanaan pemberdayaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep.

